

LAPORAN KINERJA

2023

BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKj Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2023 masih tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam rangka penguatan kapasitas kemampuan keuangan daerah.

Meskipun demikian, sebagai jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Februari 2024

Pih. KEPALA BADAN



RUDI, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197211022002121003

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indikator kinerja : Nilai RB perangkat daerah,
Formulasi perhitungan : $\text{Nilai (N)} = \text{Nilai RB perangkat daerah}$
 - Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) program, yakni program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 30 sampai dengan Desember 2023 tidak dapat terealisasi dikarenakan untuk indikator nilai RB perangkat daerah tidak dilakukan lagi penilaian ditingkat SKPD untuk seluruh entitas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan kesepakatan untuk capaiannya dianggap 100 %. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “ Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan ”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indikator kinerja : Persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD,
Formulasi perhitungan : $\text{Nilai (N)} = (\% \text{ kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan} + \% \text{ pengalokasian belanja dalam APBD})$
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja program pengelolaan keuangan daerah
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 100 % sampai dengan akhir Desember 2023 terealisasi 100 %. Dengan demikian capaian telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 100%, maka capaian target di tahun 2023 sebesar 100%)
 - b. Indikator kinerja : Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota
Formulasi perhitungan : $\text{Nilai (N)} = \text{Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota}$

- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 75; sampai dengan Desember 2023 dapat terealisasi sebesar 70,39. Dengan demikian capaian ini sebesar 93.85%. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
- c. Indikator kinerja : Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 3)
 Formulasi perhitungan : Nilai (N) = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer =1)
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja program pengelolaan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 3, sampai dengan Desember 2023 terealisasi sebesar 3. Dengan demikian capaian telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 100 % maka capaiannya sama dengan di tahun 2023.
- d. Indikator Kinerja : Ratio kemandirian keuangan daerah,
 Formulasi perhitungan : Ratio = (realisasi PAD/ realisasi pendapatan x 100 %
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja program pengelolaan pendapatan daerah
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 33.29%, sampai dengan akhir Desember 2023 terealisasi 39.13%. Dengan demikian capaian telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100 %) mencapai 117.54%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 60.35% terjadi penurunan sebesar -35,16%. Penurunan ini dikarenakan untuk indikator kinerja ratio kemandirian keuangan daerah, formulasi perhitungan untuk tahun 2022 menggunakan perbandingan antara realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi pendapatan dana transfer sedangkan di tahun 2023 menggunakan perbandingan antara realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi pendapatan.
- e. Indikator Kinerja : Persentase penyerapan APBD
 Formulasi perhitungan : Nilai (N)= Serapan (% belanja operasional + % belanja modal + % BTT + % belanja transfer)
- Capaian indikator kinerja dimaksud didukung oleh kinerja program pengelolaan keuangan daerah

- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 92.50%, sampai dengan akhir Desember 2023 terealisasi 91.18%. Dengan demikian capaian tidak melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100 %) mencapai 98.60%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

- Masih banyaknya kendala perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban selaku objek pendapatan daerah;
- Masih lemahnya Identifikasi, pengkajian dan monitoring terhadap potensi sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- Masih kurangnya kuantitas sumber daya aparatur pada Unit Pelaksana Teknis Badan dan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan;
- Masih terbatasnya penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan;
- Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah;
- Belum optimalnya penatausahaan, pengamanan dan pengawasan barang milik daerah;
- Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan untuk retribusi daerah dan anggaran sosialisasi dan promosi terbatas, serta system pengawasan retribusi kurang optimal;
- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | 3 |
| DAFTAR ISI | 5 |
| DAFTAR TABEL..... | 6 |
| DAFTAR GAMBAR | 7 |
| BAB I PENDAHULUAN | 8 |
| 1.1 Cascading kinerja sebagai dasar pembentukan organisasi perangkat daerah..... | 8 |
| 1.2 Mandat kinerja, peta proses bisnis dan struktur organisasi..... | 9 |
| 1.3 Tugas, fungsi dan peta jabatan | 11 |
| 1.4 Isu-isu strategis | 12 |
| 1.5 Dukungan SDM, sarana - prasarana dan anggaran | 12 |
| 1.6 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP 2022..... | 15 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 16 |
| 2.1 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja OPD | 16 |
| 2.2 Strategi dan arah kebijakan..... | 17 |
| 2.3 Struktur program dan kegiatan 2023 | 17 |
| 2.4 Perjanjian kinerja tahun 2023 | 19 |
| 2.5 Instrumen pendukung capaian kinerja..... | 19 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 21 |
| 3.1. Capaian kinerja tahun 2023..... | 21 |
| 3.2. Analisis ketercapaian kinerja tahun 2023..... | 26 |
| 3.3. Realisasi anggaran..... | 30 |
| BAB IV PENUTUP | 32 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 33 |

Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel I.1 Jumlah pegawai menurut kualifikasi jabatan, jenis kelamin dan kompetensi | 13 |
| Tabel I.2 Sarana - prasarana | 14 |
| Tabel I.3 Perbandingan anggaran tahun 2022 dan 2023 | 15 |
| Tabel II.1 Sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... | 17 |
| Tabel II.2 Strategi dan arah kebijakan | 17 |
| Tabel II.3.1 Struktur program dan kegiatan terkait langsung pencapaian sasaran tahun 2023 | 18 |
| Tabel II.3.2 Struktur program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran tahun 2023 | 18 |
| Tabel II.4 Perjanjian kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023..... | 19 |
| Tabel III.1 Skala nilai peringkat kinerja | 21 |
| Tabel III.2 Capaian kinerja tahun 2023 | 22 |
| Tabel III.3 Pengukuran capaian sasaran | 24 |
| Tabel III.4 Target dan realisasi kinerja | 25 |
| Tabel III.5 Anggaran dan realisasi belanja langsung per sasaran tahun 2023 | 27 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar I.1. Cascading kinerja | 9 |
| Gambar I.2. Mandat kinerja peta proses bisnis dan struktur Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 10 |
| Gambar I.3. Tugas, fungsi dan peta jabatan pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 10 |
| Gambar II.1. Website Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 10 |
| Gambar II.2. Layanan pengaduan melalui website Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 10 |

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah/pemerintah daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
 - b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

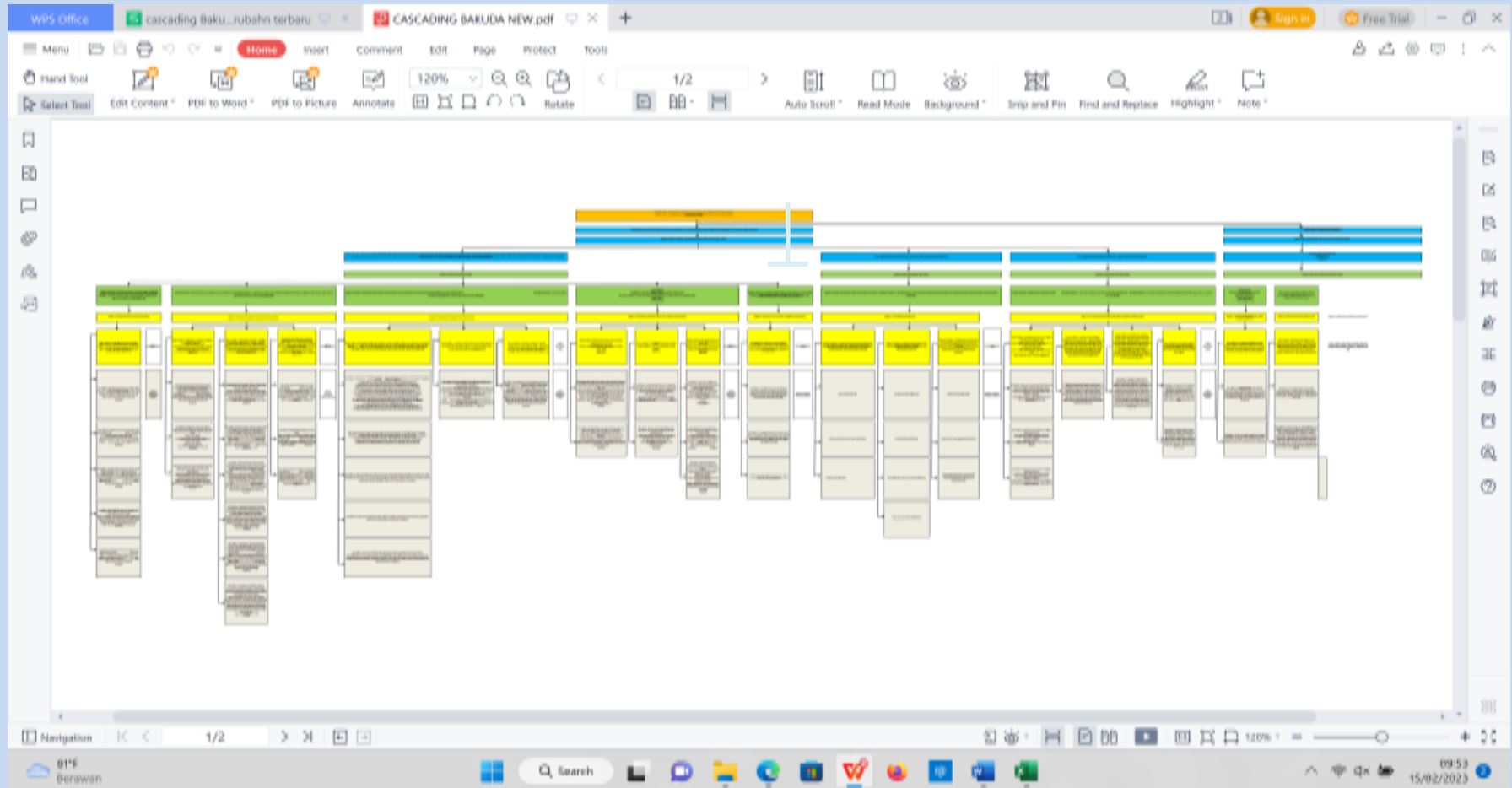
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap perangkat daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan berupa dokumen rencana strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

“CASCADING”



Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

“PETA PROSES BISNIS”

| | | | | | | |
|--|---|-----------|--|--|------------------|--------------------|
| TUJUAN 4: Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | | |
| BBL -17 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | | | | | | |
| 1 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | BBL-17.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | BBL-17.01.CFM.01 | BAKUDA |
| | | | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | BBL-17.01.CFM.02 | BAKUDA |
| | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | BBL-17.01.CFM.03 | BAKUDA |
| | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | BBL-17.01.CFM.04 | BAKUDA |
| | | | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | BBL-17.01.CFM.05 | BAKUDA |
| 2 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | BBL-17.02 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | BBL-17.02.CFM.01 | BAKUDA |
| 3 | Program pengelolaan pendapatan daerah | BBL-17.03 | | Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah | BBL-17.03.CFM.01 | BAKUDA |
| | | | | Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah | BBL-17.03.CFM.02 | UPTB BAKUDA |

PETA RELASI BBL-17

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Badan Keuangan Daerah
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Keuangan
4. Gubernur
5. TAPD
6. DPRD
7. Pemerintah Kabupaten/Kota
8. SKPD

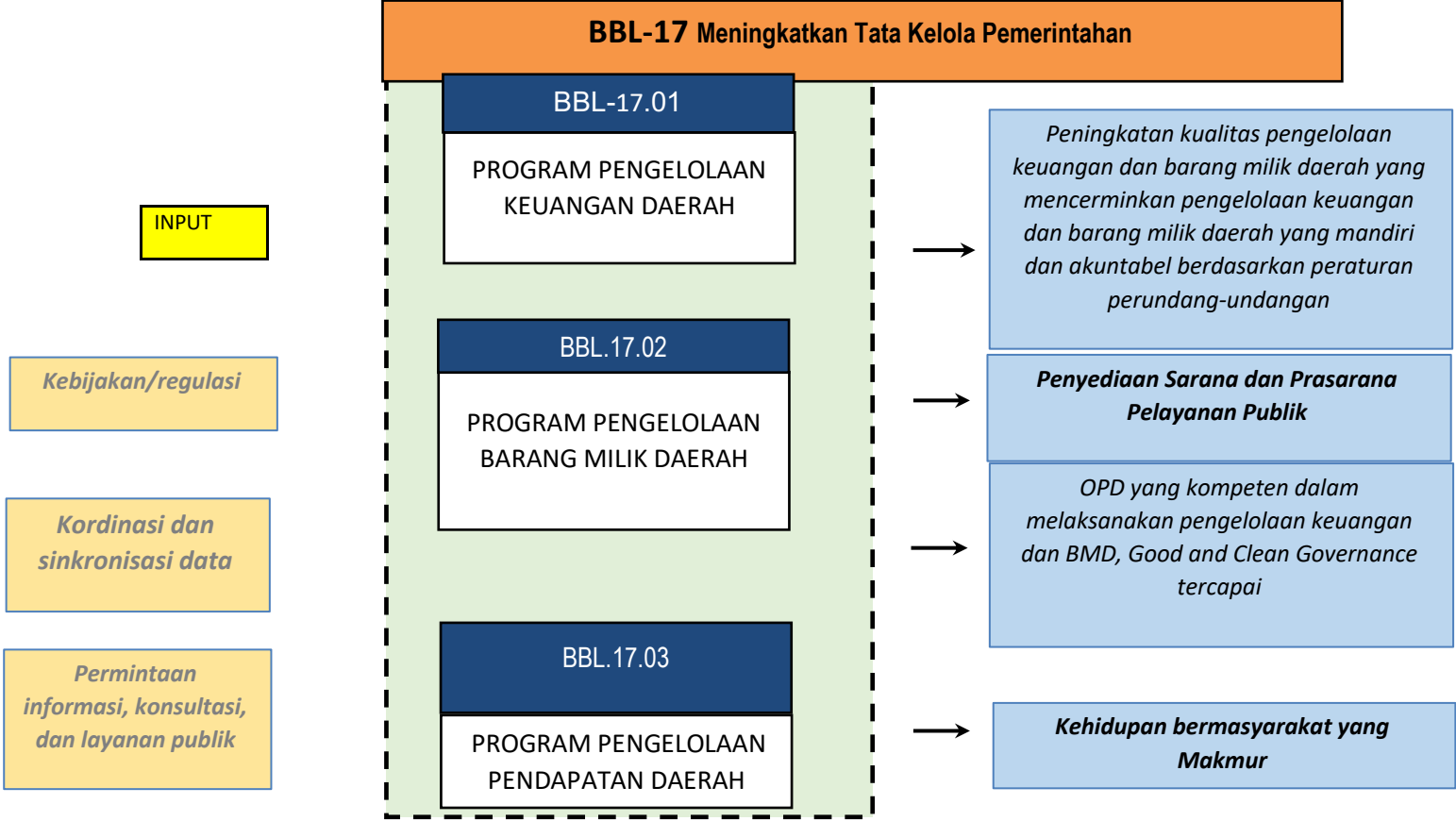
2. Program Pengelolaan Barang Milik

1. Badan Keuangan Daerah
2. Kementerian Dalam Negeri
2. Gubernur
3. Sekda
4. OPD

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

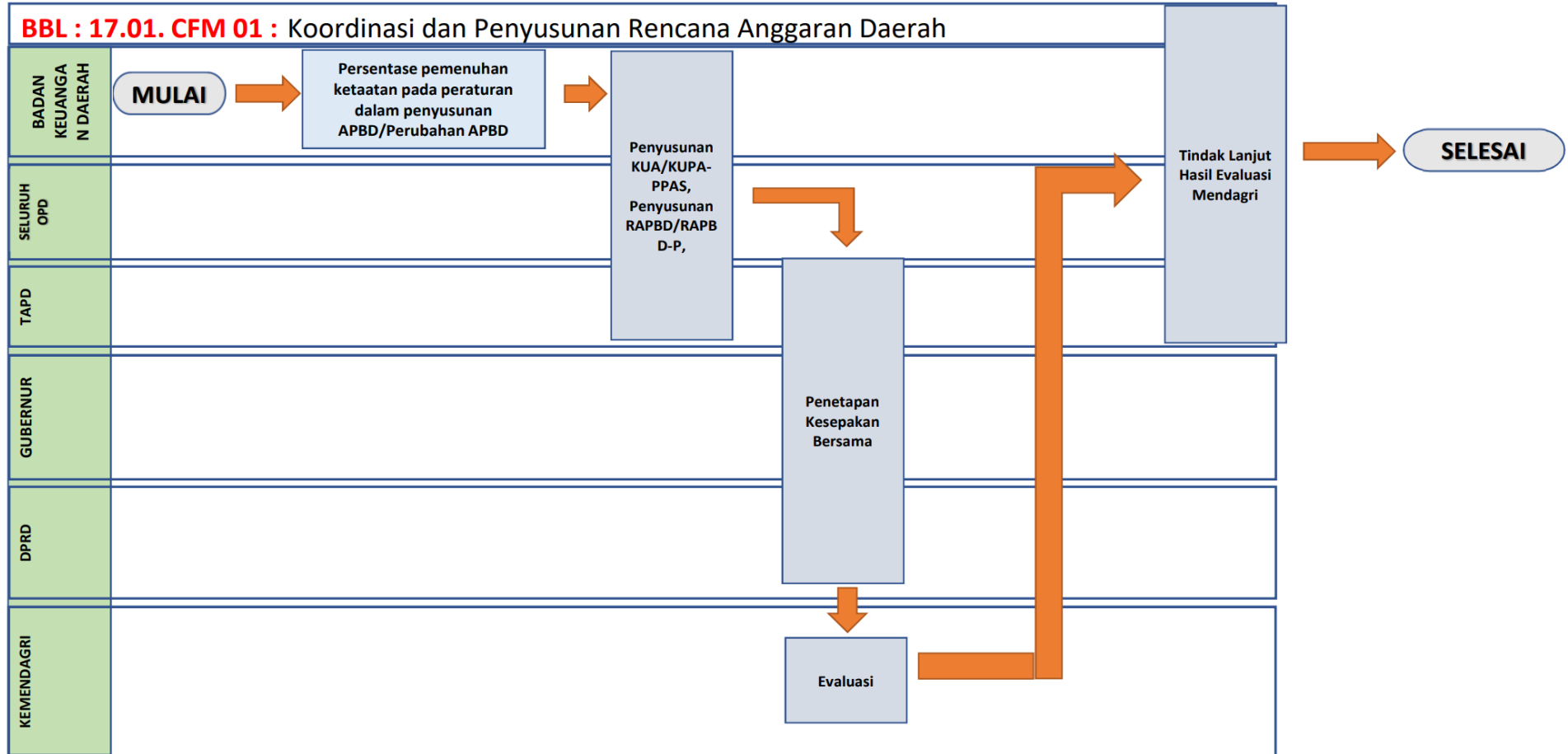
1. Badan Keuangan Daerah
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Gubernur
4. Sekda
5. Kepolisian
6. Jasa Raharja
7. Bank
8. OPD Teknis yang mengelola pendapatan
5. Kecamatan/Lurah/Desa

PETA SUB PROSES

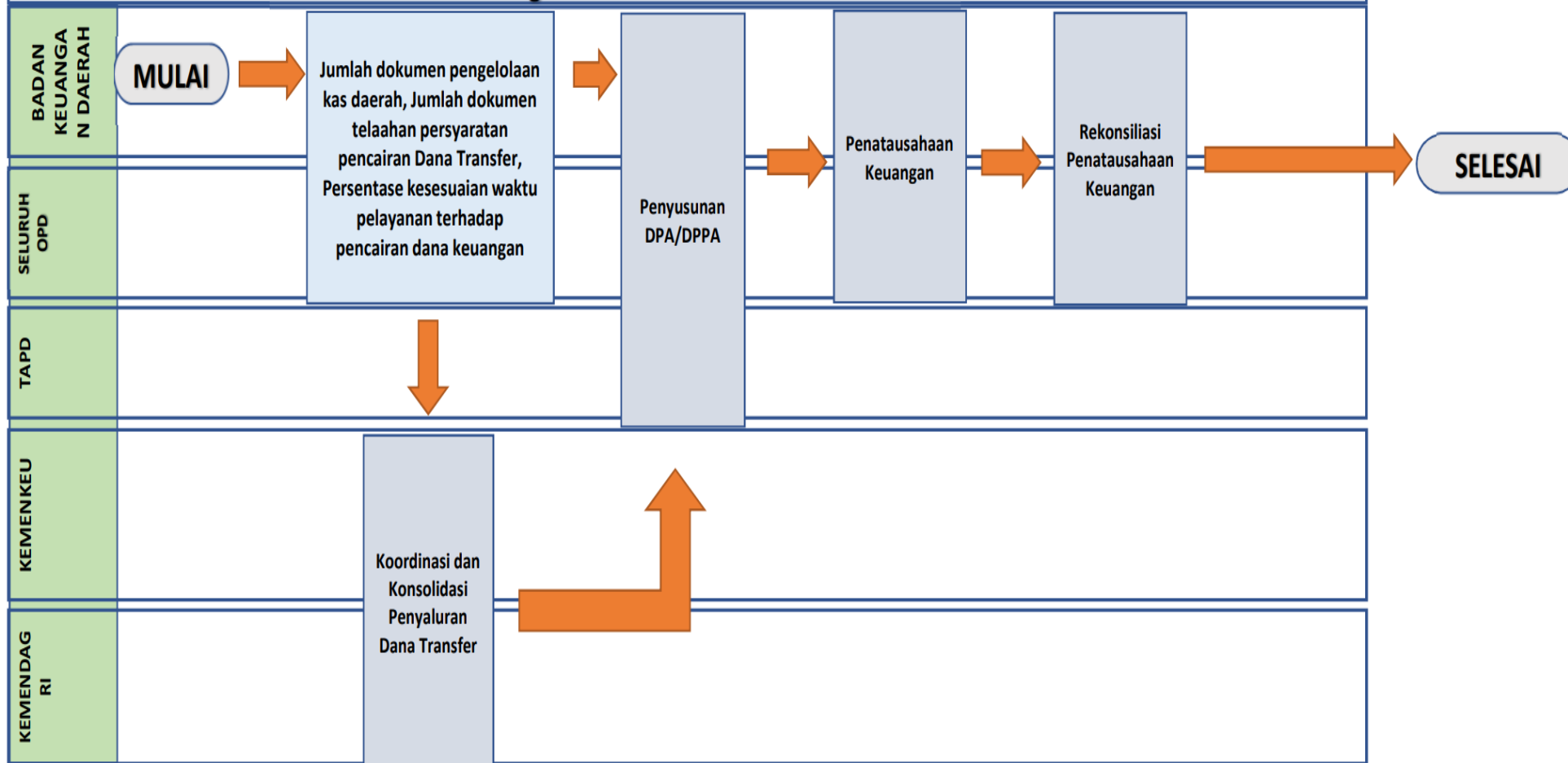


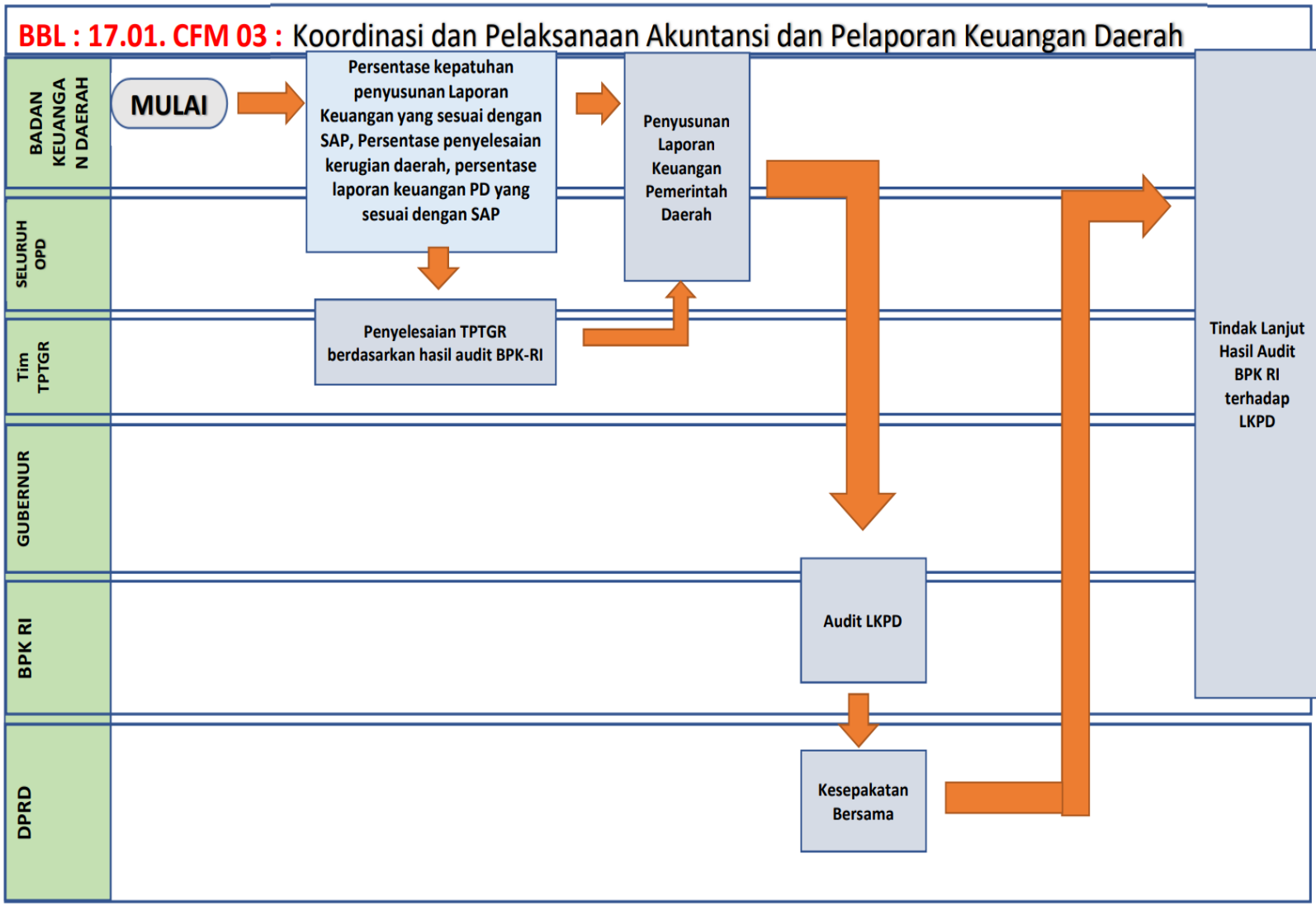
PETA LINTAS FUNGSI

BBL : 17.01. CFM 01 : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

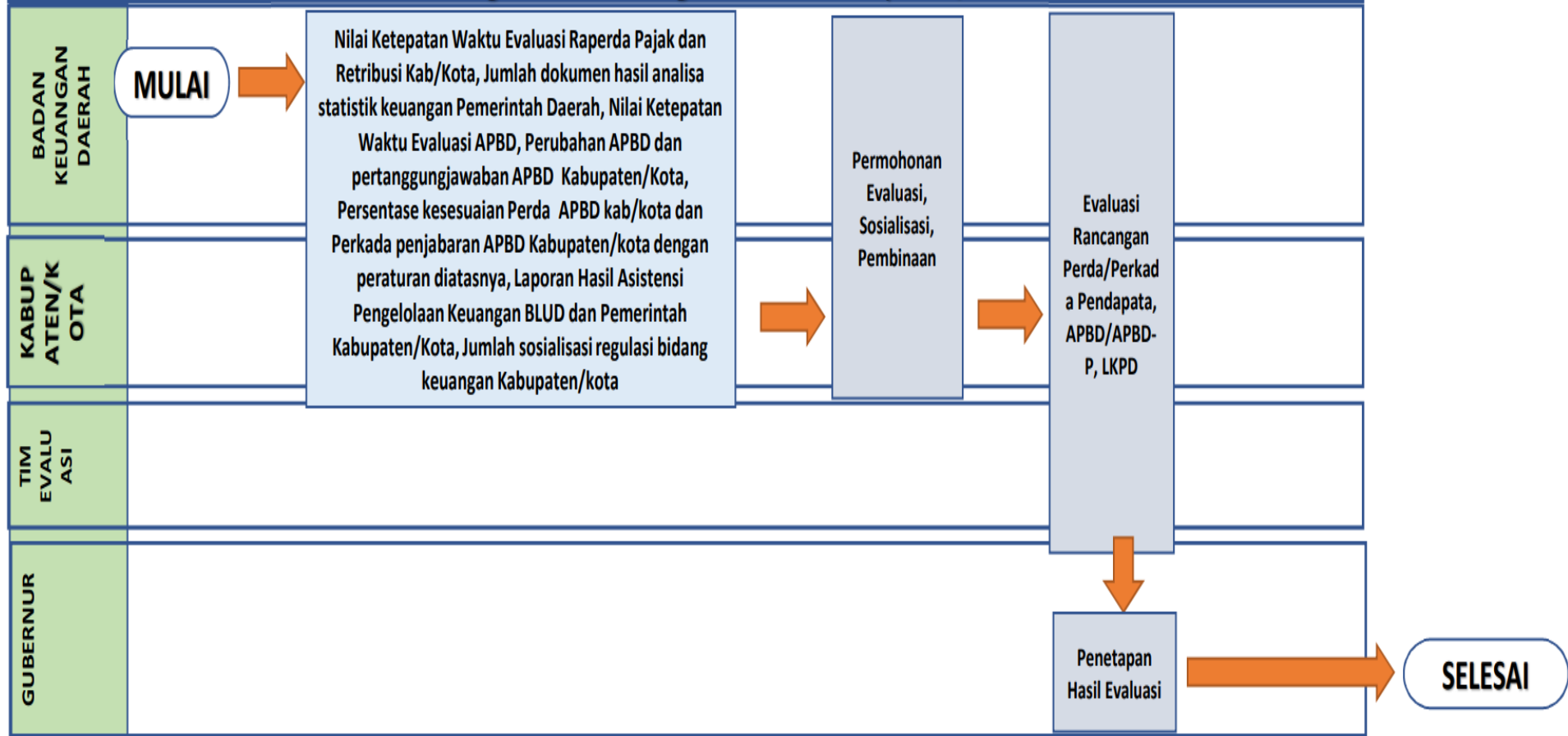


BBL : 17.01. CFM 02 : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

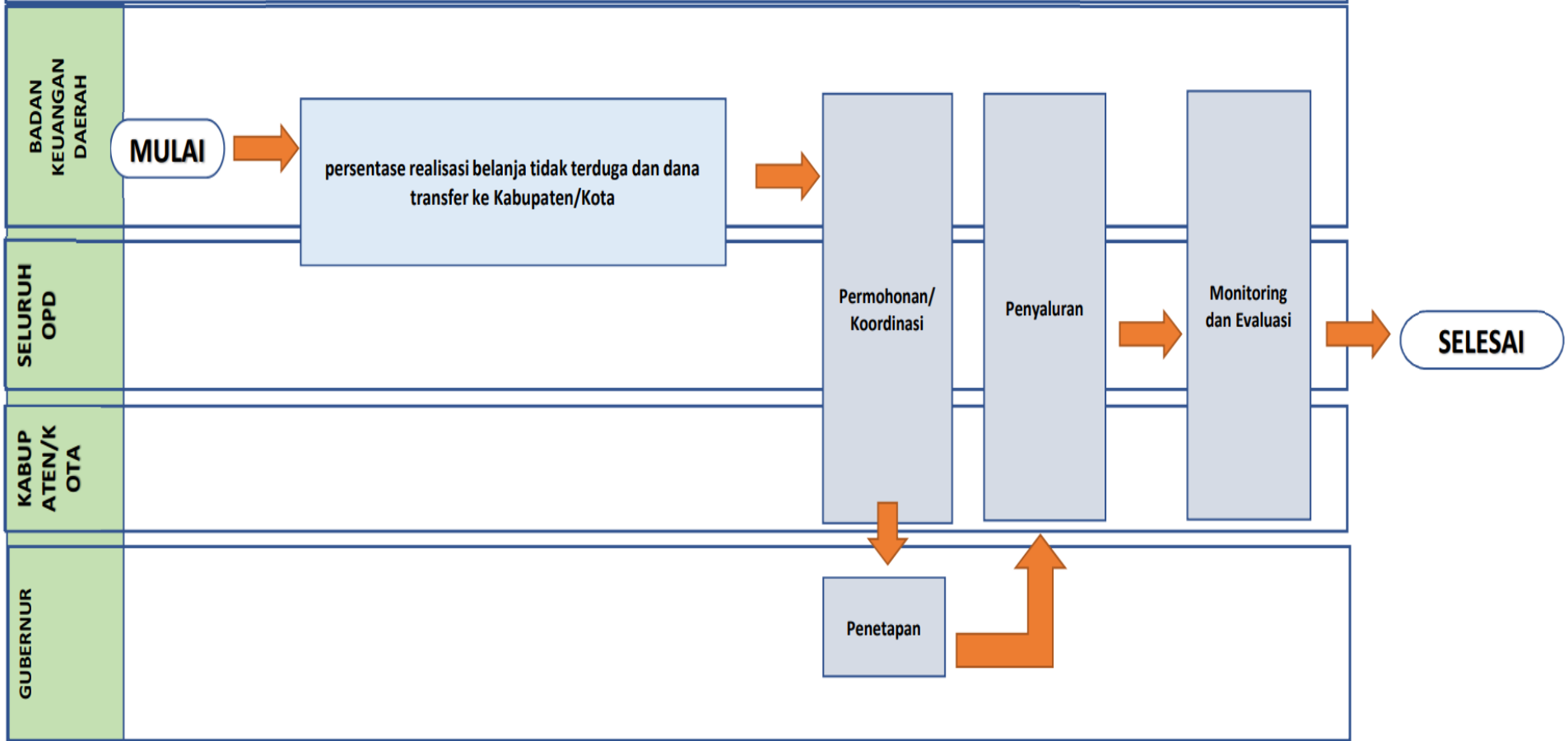




BBL : 17.01. CFM 04 : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

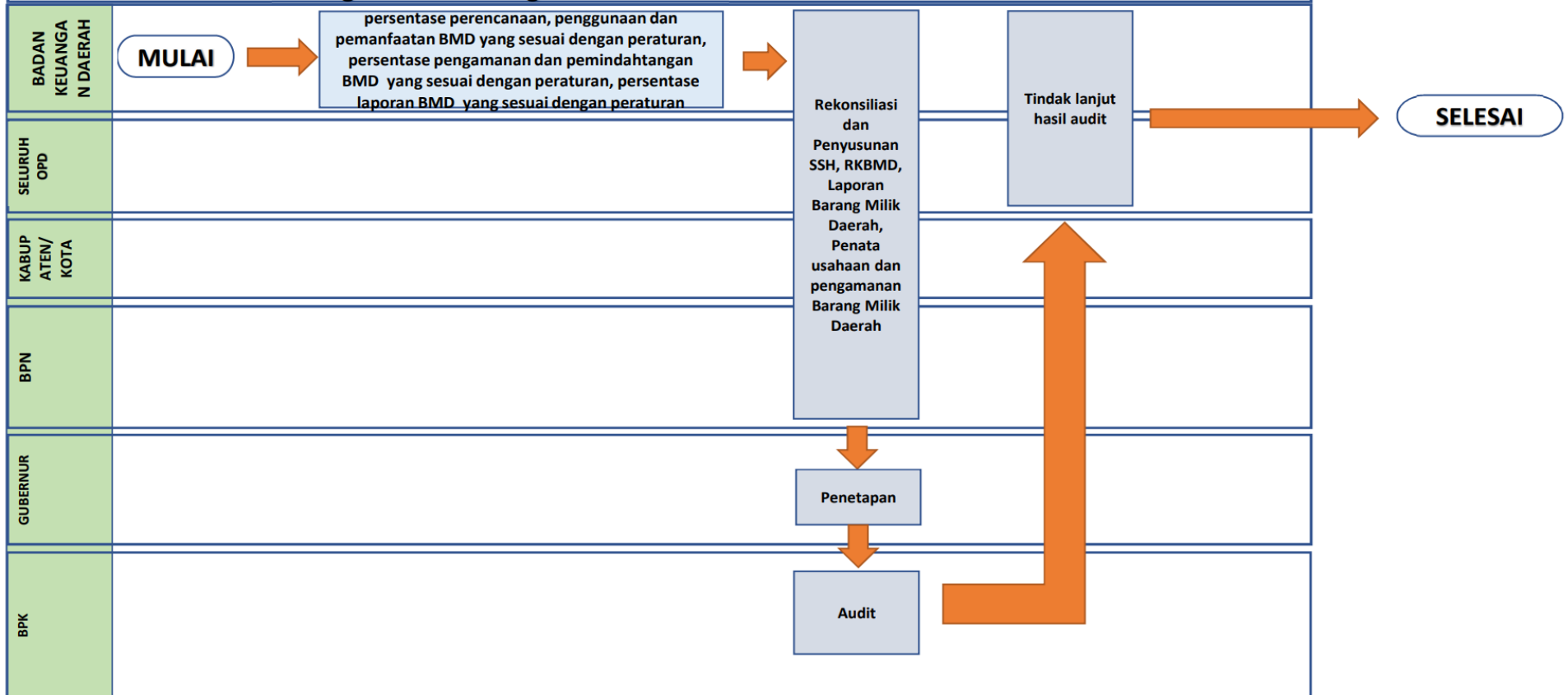


BBL : 17.01. CFM 05 : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

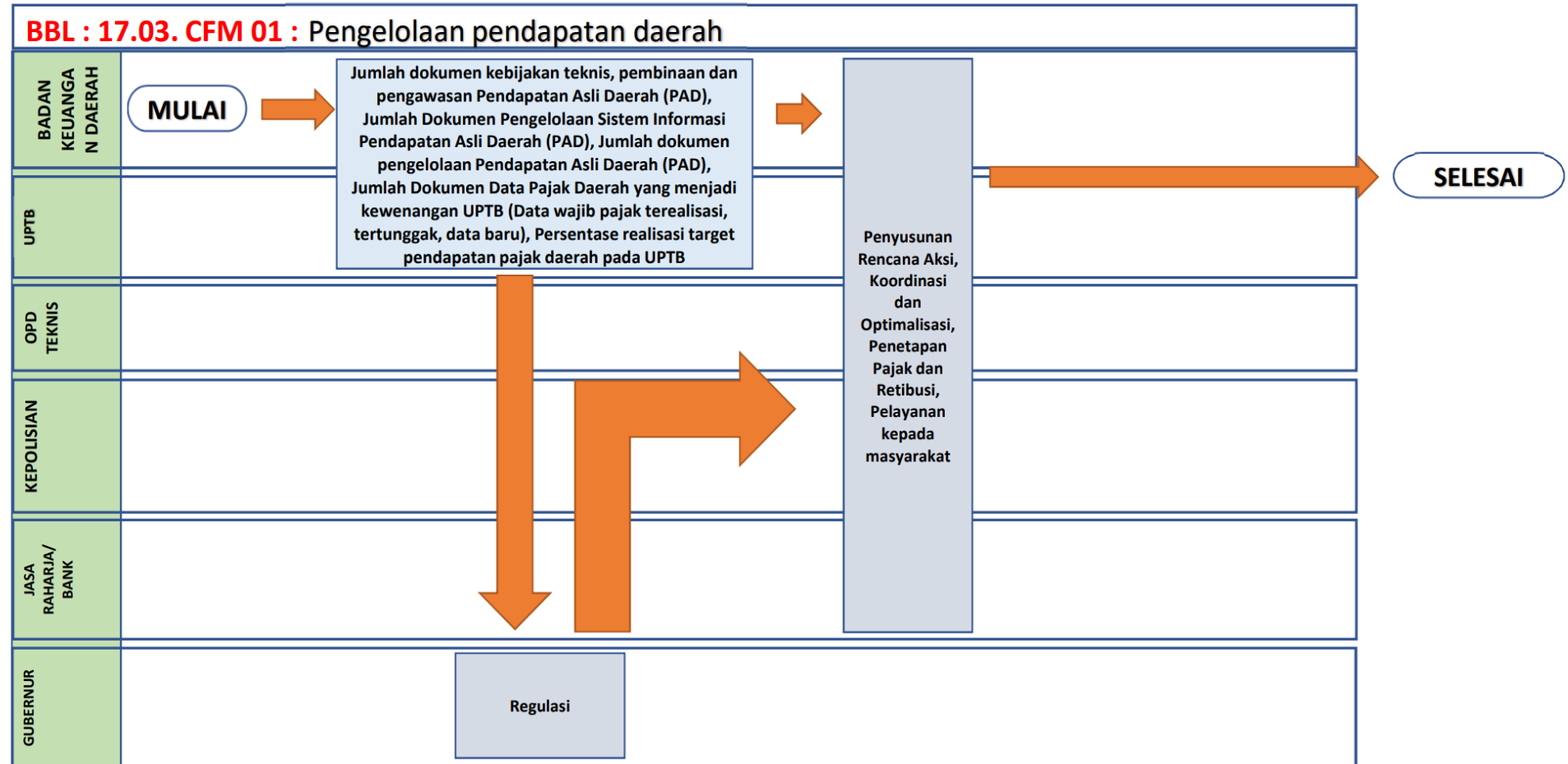


PETA LINTAS FUNGSI

BBL : 17.02. CFM 01 : Pengelolaan Barang Milik Daerah



PETA LINTAS FUNGSI



Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Badan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Adapun Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berfungsi sebagai berikut :

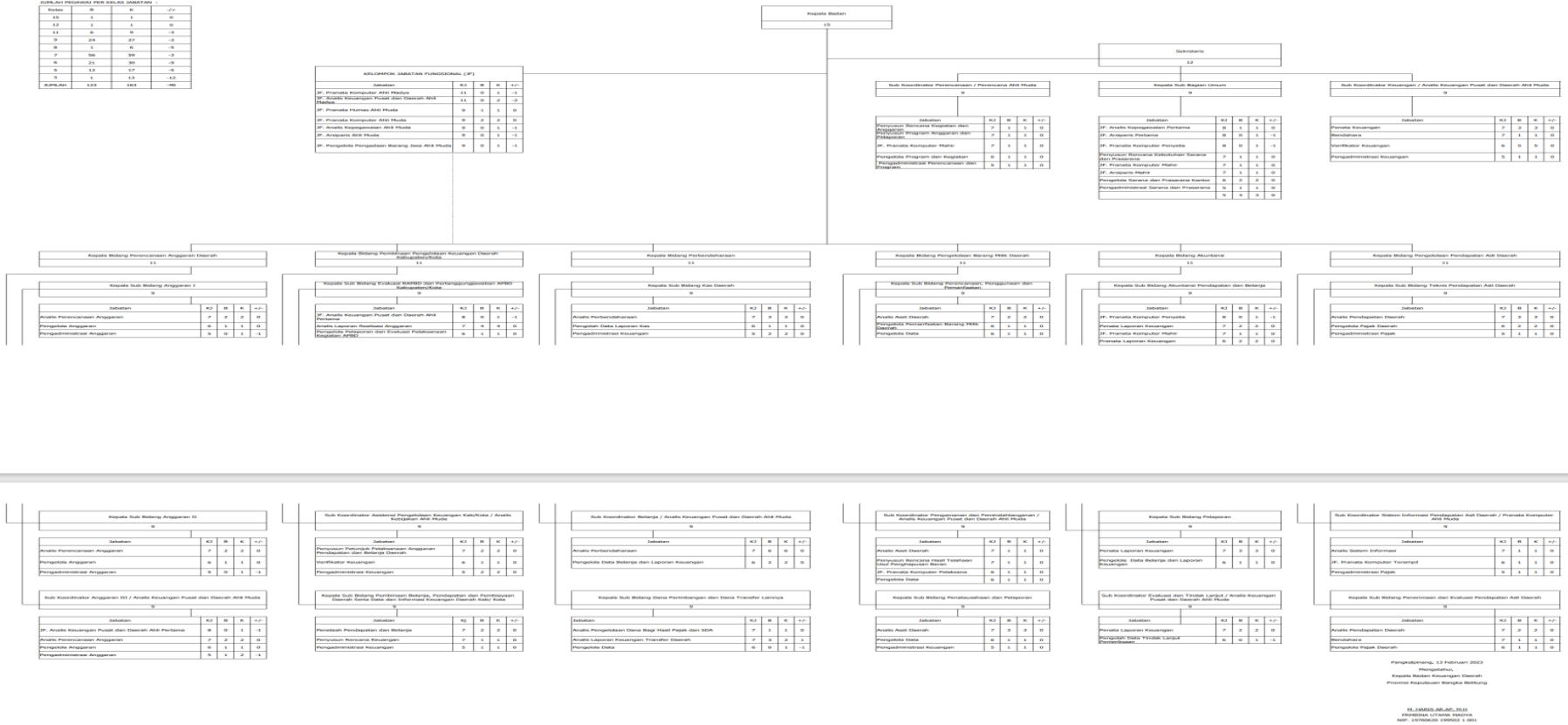
1. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang keuangan yang menjadi kewenangan provinsi;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
4. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang keuangan;
5. Penyelenggaraan administrasi Badan Keuangan Daerah;
6. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

PETA JABATAN

PETA JABATAN BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| JUMLAH PESAWIR PER KELAS JABATAN | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|----|-----|
| Kelas | K | K | K | J/T |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 24 | 27 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 20 | 1 | 1 |
| 6 | 21 | 30 | 1 | 1 |
| 5 | 14 | 17 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| Jumlah | 124 | 163 | 10 | 10 |

| KELompok Jabatan Fungsional (JF) | | | | |
|---|----|----|---|-----|
| Jabatan | K2 | K1 | K | J/T |
| JF. Prinsipal Komputer Ahli Muda | 11 | 0 | 1 | 1 |
| JF. Prinsipal Komputer Pustak dan Dokumentasi | 11 | 0 | 1 | 1 |
| JF. Prinsipal Pustak Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 1 |
| JF. Prinsipal Komputer Ahli Muda | 9 | 2 | 2 | 2 |
| JF. Analis Keperawatan Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | 1 |
| JF. Analis Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | 1 |
| JF. Pengabdian Pengabdian Berbasis Ilmu Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | 1 |



Pangkalpinang, 13 Februari 2023
 Kepala Badan
 Kepala Badan Keperawatan Umum
 Kepala Keperawatan Bangka Belitung

14.00000.00.00.00
 UNIVERSITAS CYBERIA BELITUNG
 APT. SYAMSUDIN SYAMSUDIN S. S. S.

1.2 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari perangkat daerah yang memiliki tujuan “mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas serta mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang baik”, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah melalui PAD;
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

| NO | JABATAN | FORMASI/PETA JABATAN | | | | | PEGAWAI YANG ADA | | | | | JENIS KELAMIN | |
|----------|---------------------------|----------------------|-------------|-----|----|---------|------------------|-------------|-----|----|---------|---------------|-----------|
| | | JUMLAH | KUALIFIKASI | | | | JUMLAH | KUALIFIKASI | | | | LAKI- LAKI | PEREMPUAN |
| | | | S2 | S1 | D3 | SMA/SMP | | S2 | S1 | D3 | SMA/SMP | | |
| A | JABATAN STRUKUTRAL | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Eselon II | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | v | |
| 2 | Eselon III | 14 | 6 | 8 | | | 14 | 6 | 8 | | | v | |
| 3 | Eselon IV | 33 | 9 | 23 | 1 | | 33 | 9 | 23 | 1 | | 21 | 12 |
| B | JABATAN FUNGSIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ahli Muda | 13 | 4 | 9 | | | 13 | 4 | 9 | | | 12 | 1 |
| 2 | Ahli Pertama | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 |
| 3 | Mahir | 5 | | | 5 | | 5 | | | 5 | | 3 | 2 |
| 4 | Pelaksana | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| C | JABATAN PELAKSANA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksana | 218 | 3 | 108 | 59 | 48 | 218 | 3 | 108 | 59 | 48 | 111 | 107 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dst..... | | | | | | | | | | | | |
| D | PHL | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Phl | 163 | | 61 | 19 | 83 | | | 61 | 61 | 83 | 96 | 67 |
| 2 | Dst..... | | | | | | | | | | | | |

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 210 orang (42.76%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 23 orang (4.68%), D3 sebanyak 127 orang (25.86%), SLTA sebanyak 131 orang (26.68%), SLTP sebanyak 0 orang (0%), dan SD sebanyak 0 orang (0%). Komposisi pegawai perempuan/laki-laki*) sedikit lebih banyak/sedikit*) dibanding pegawai perempuan/laki-laki*); bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak/sedikit*) dijabat perempuan/laki-laki*). Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana - Prasarana

| No. | Klasifikasi | Jumlah Barang | Nilai Aset* |
|----------|---|---------------|--------------------------|
| 1 | TANAH | | 6.015.770.640,00 |
| | TANAH | | 6.015.770.640,00 |
| 2 | PERALATAN DAN MESIN | | 41.806.150.162,48 |
| | ALAT BESAR | | 2.563.075.646,00 |
| | ALAT ANGKUTAN | | 8.810.172.120,00 |
| | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | | 599.367.350,00 |
| | ALAT PERTANIAN | | 0 |
| | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | | 13.039.530.770,48 |
| | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | | 1.714.218.304,00 |
| | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | | 17.325.000,00 |
| | ALAT LABORATORIUM | | 0 |
| | ALAT PERSENJATAAN | | 0 |
| | KOMPUTER | | 14.976.359.017,00 |
| | ALAT EKSPLORASI | | 0 |
| | ALAT PENGEBORAN | | 0 |
| | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | | 0 |
| | ALAT BANTU EKSPLORASI | | 0 |
| | ALAT KESELAMATAN KERJA | | 56.371.955,00 |
| | ALAT PERAGA | | 0 |
| | PERALATAN PROSES/PRODUKSI | | 0 |
| | RAMBU – RAMBU | | 29.730.000,00 |
| | PERALATAN OLAH RAGA | | 0 |
| 3 | GEDUNG DAN BANGUNAN | | 39.834.521.551,98 |
| | BANGUNAN GEDUNG | | 39.834.521.551,98 |
| | MONUMEN | | 0 |
| | BANGUNAN MENARA | | 0 |
| | TUGU TITIK KONTROL/PASTI | | 0 |
| 4 | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | | 1.075.121.332,00 |
| | JALAN DAN JEMBATAN | | 98.600.000,00 |
| | BANGUNAN AIR | | |
| | INSTALASI | | 976.521.332,00 |
| | JARINGAN | | 0 |

| | | | |
|----------|---|--|--------------------------|
| 5 | ASET TETAP LAINNYA | | 65.376.254,00 |
| | BAHAN PERPUSTAKAAN | | 0 |
| | BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA | | 10.000.000,00 |
| | HEWAN | | 0 |
| | BIOTA PERAIRAN | | 0 |
| | TANAMAN | | 55.376.254,00 |
| | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA | | 0 |
| | ASET TETAP DALAM RENOVASI | | 0 |
| 6 | KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan | | 0 |
| | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | | 0 |
| 7 | ASET LAINNYA | | 0 |
| | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | | 0 |
| | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | | 0 |
| 8 | ASET TIDAK BERWUJUD | | 0 |
| | ASET TIDAK BERWUJUD | | 0 |
| 9 | ASET LAIN-LAIN | | 2.773.043.695,00 |
| | ASET LAIN-LAIN | | 2.773.043.695,00 |
| | | | |
| | TOTAL | | 91.569.983.635.46 |

Kendaraan operasional Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 8 unit kendaraan dinas jabatan, 19 unit kendaraan operasional, 34 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 3 : 5. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah/~~belum~~*) memadai. Hanya saja sebanyak 60 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung*) tuntutan pekerjaan yang 100 % berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

| Tahun | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah |
|-------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 2022 | 88.722.949.568 | 10.249.059.792 | 204.777.736.984 | 488.494.005.177 | 792.243.751.521 |
| 2023 | 91.543.132.355 | 10.714.246.696 | 33.950.100.075 | 638.786.914.191 | 774.994.393.317 |

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 dibanding tahun 2022 terdapat kenaikan/~~penurunan~~*) total anggaran belanja sebesar Rp 17.249.358.204,-. Hal

ini menunjukkan ada kendala/tidak ada kendala*) anggaran untuk membiayai program/kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

| No | Saran/Rekomendasi | Tindak lanjut |
|----|--|--|
| 1. | <p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/138/LHE/ITDA/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2022 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada laporan kinerja; 2. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; 3. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja; 4. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja; 5. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; 6. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja agar mempengaruhi | <p>Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian terget kinerja (output dan outcome) Tahun 2022 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencantumkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja) pada laporan kinerja; 2. Mengupayakan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; 3. Mengupayakan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja ; 4. Mengupayakan informasi dalam laporan kinerja digunakan untuk evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja; 5. Mengupayakan agar informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; 6. Mengupayakan agar informasi dalam laporan kinerja agar mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi; 7. Mengupayakan pelaksanaan evaluasi |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>perubahan budaya kinerja organisasi;</p> <p>7. Membuat Surat Keputusan atau Surat Tugas pelaksanaan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh SDM yang berkompeten;</p> <p>8. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga memberikan dampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja dan segera menindaklanjuti isu - isu atau hambatan yang dapat menghambat capaian kinerja</p> | <p>kinerja dilakukan oleh SDM yang berkompeten;</p> <p>8. Mengupayakan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga memberikan dampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja dan segera menindaklanjuti isu - isu atau hambatan yang dapat menghambat capaian kinerja</p> |
|--|---|---|

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran pemerintah daerah dalam meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang baik;

Adapun sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Baseline2022 | TARGET TAHUNAN | | | | Target Akhir Renstra | Ket |
|-----|---|--|--------|--------------|----------------|------|------|------|----------------------|-----|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah (BAKUDA) | Nilai RB perangkat daerah (BAKUDA) | Nilai | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | |
| 2. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan | Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD | Persen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Nilai rata-rata IPKD kabupaten/kota | Nilai | - | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | |
| | | Persentase penyerapan anggaran belanja APBD | Persen | - | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94 | |
| | | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1) | Nilai | - | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | Ratio kemandirian keuangan daerah | Persen | - | 33.29 | 33.45 | 33.51 | 33.67 | 33.67 | |
|--|--|-----------------------------------|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|-----|---|---|------------------------------------|---|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah | Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah (BAKUDA) | Nilai RB perangkat daerah (BAKUDA) | Melaksanakan tata kelola pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah yang dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik | Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah yang dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan prinsip akuntabel, efektifitas dan efisien |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan | Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD | Melaksanakan penyusunan APBD yang sinkron dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah dan mandatory perundang - undangan | Peningkatan Implementasi penganggaran keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) disertai dengan penguatan koordinasi dan konsolidasi internal pemerintah daerah |
| | | | Nilai rata-rata IPKD kabupaten/kota | Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi | Peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota yang diimplementasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) |
| | | | Persentase penyerapan anggaran belanja APBD | Melaksanakan penatausahaan | Peningkatan implementasi |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | perbendaharaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | penatausahaan perbendaharaan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) |
| | | | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1) | Melaksanakan penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam implementasi penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
| | | | | Melaksanakan tata kelola barang milik | Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam tata |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| | | | | daerah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | kelola barang milik Odaerah yang dapat menyajikan kewajaran dan kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
| | | | Ratio kemandirian keuangan daerah | Melaksanakan pemungutan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan | Peningkatan pendapatan asli daerah semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan peningkatan jumlah objek pajak daerah potensial |

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

| SASARAN | | PROGRAM / KEGIATAN | | SEBELUM PERUBAHAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH |
|---------|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | /BERKURANG |
| 1. | Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah | 1.1 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 85.791.316.438 | 91.911.447.193 | 6.120.130.755 |
| | | 1.1.1 | Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 113.480.280 | 151.449.900 | 37.969.620 |
| | | 1.1.2 | Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 58.678.975.840 | 59.587.896.359 | 908.920.519 |
| | | 1.1.3 | Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 683.326.660 | 847.054.139 | 163.727.479 |
| | | 1.1.4 | Kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 6.797.232.426 | 7.284.057.602 | 486.825.176 |
| | | 1.1.5 | Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 7.622.293.827 | 10.769.742.750 | 3.147.448.923 |
| | | 1.1.6 | Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 8.013.170.830 | 8.040.992.503 | 27.821.673 |
| | | 1.1.7 | Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 3.882.836.575 | 5.230.253.940 | 1.347.417.365 |
| 2. | Meningkatkan kemampuan dan | 2.1 | Program pengelolaan keuangan daerah | 481.802.235.788 | 676.844.952.774 | 195.042.716.986 |

| | | | | | |
|--|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| pengelolaan keuangan daerah | 2.1.1 | Kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah | 1.345.055.020 | 1.591.707.640 | 246.652.620 |
| | 2.1.2 | Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota | 1.300.907.600 | 1.317.348.000 | 16.440.400 |
| | 2.1.3 | Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah | 310.000.000 | 558.050.000 | 248.050.000 |
| | 2.1.4 | Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah | 449.769.155 | 581.132.868 | 131.363.713 |
| | 2.1.5 | Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah | 478.396.504.013 | 672.796.714.266 | 194.400.210.253 |
| | | | | | |
| | 3.1 | Program pengelolaan barang milik daerah | 708.240.600 | 766.628.100 | 58.387.500 |
| | 3.1.1 | Kegiatan pengelolaan barang milik daerah | 708.240.600 | 766.628.100 | 58.387.500 |
| | | | | | |
| | 4.1 | Program pengelolaan pendapatan daerah | 2.871.089.040 | 5.471.365.250 | 2.600.276.210 |
| | 4.1.1 | Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah | 2.871.089.040 | 5.471.365.250 | 2.600.276.210 |
| | | | | | |
| Total anggaran berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran | | | 571.172.881.866 | 774.994.393.317 | 203.821.511.451 |

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

tahun 2023 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023**

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN | TRIWULAN | TARGET |
|---------|---|--|--------|----------------|--------------|--------|
| 1. | Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah | Nilai RB perangkat daerah | Nilai | 30 | Triwulan I | |
| | | | | | Triwulan II | |
| | | | | | Triwulan III | v |
| | | | | | Triwulan IV | |
| 2. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan | Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD | Persen | 100 | Triwulan I | |
| | | | | | Triwulan II | |
| | | | | | Triwulan III | |
| | | | | | Triwulan IV | v |
| | | Nilai rata - rata IPKD kabupaten / kota | Nilai | 75 | Triwulan I | |
| | | | | | Triwulan II | |
| | | | | | Triwulan III | |
| | | | | | Triwulan IV | v |
| | | Persentase penyerapan anggaran belanja APBD | Persen | 92.5 | Triwulan I | |
| | | | | | Triwulan II | |
| | | | | | Triwulan III | |
| | | | | | Triwulan IV | v |
| | | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1) | Nilai | 3 | Triwulan I | |
| | | | | | Triwulan II | v |
| | | | | | Triwulan III | |
| | | | | | Triwulan IV | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------|-------|--------------|---|
| | | | | | | |
| | | Ratio kemandirian keuangan daerah | Persen | 33.29 | Triwulan I | |
| | | | | | Triwulan II | |
| | | | | | Triwulan III | |
| | | | | | Triwulan IV | v |
| | | | | | | |

Pada tahun 2023, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN | TRIWULAN | TARGET | |
|---------|---|--|--------|----------------|--------------|--------|--|
| 1. | Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah | Nilai RB perangkat daerah | Nilai | 30 | Triwulan I | | |
| | | | | | Triwulan II | | |
| | | | | | Triwulan III | v | |
| | | | | | Triwulan IV | | |
| | | | | | | | |
| 2. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan | Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD | Persen | 100 | Triwulan I | | |
| | | | | | Triwulan II | | |
| | | | | | Triwulan III | | |
| | | | | | Triwulan IV | v | |
| | | | | | | | |
| | | Nilai rata - rata IPKD kabupaten | Nilai | 75 | Triwulan I | | |
| | | | | Triwulan II | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------|-------|--------------|---|
| | / kota | | | Triwulan III | |
| | | | | Triwulan IV | v |
| | | | | | |
| | Persentase penyerapan anggaran belanja APBD | Persen | 92.5 | Triwulan I | |
| | | | | Triwulan II | |
| | | | | Triwulan III | |
| | | | | Triwulan IV | v |
| | | | | | |
| | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1) | Nilai | 3 | Triwulan I | |
| | | | | Triwulan II | v |
| | | | | Triwulan III | |
| | | | | Triwulan IV | |
| | | | | | |
| | Ratio kemandirian keuangan daerah | Persen | 33.29 | Triwulan I | |
| | | | | Triwulan II | |
| | | | | Triwulan III | |
| | | | | Triwulan IV | v |
| | | | | | |

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran ~~berkurang~~/bertambah 35,68 %
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Mengelola anggaran belanja tidak terduga, yaitu:
 - 3.1. BTT dalam rangka untuk mengatasi keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang mana penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku Rp 33.950.100.075,-

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

8.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | KRITERIA Kode |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1. | $91 \leq 100$ | Sangat Baik | Hijau Tua |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi | Hijau Muda |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang | Kuning Tua |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah | Kuning Muda |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR / META INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2022 | TAHUN 2023 | | | | | TARGET AKHIR RENSTRA |
|----|--|--|--------|---------------|--------------|--------|-----------|------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | CAPAIAN 2023 | TARGET | REALISASI | PERSENTASE | KRITERIA / KODE | |
| 1. | Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah | <p><u>Indikator :</u> Nilai RB perangkat daerah</p> <p><u>Formula Perhitungan :</u> N = Nilai RB perangkat daerah</p> | Nilai | 25 | 0 | 30 | 100 | - | - | 45 |
| 2. | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan | <p><u>Indikator :</u> Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan belanja dalam APBD</p> <p><u>Formula Perhitungan :</u> N = % kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan + % pengalokasian belanja dalam APBD</p> | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SANGAT BAIK | 100 |
| | | <p><u>Indikator :</u> Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota</p> <p><u>Formula Perhitungan :</u> N = Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota</p> | Nilai | 77 | 0 | 75 | 100 | - | - | 81 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|-------|
| | | | | | | | | | |
| | <p><u>Indikator :</u> Persentase penyerapan APBD</p> <p><u>Formula Perhitungan :</u> N = Serapan (% belanja operasional + % belanja modal + % BTT + % belanja transfer)</p> | Persen | - | 91.18 | 92.50 | 91.18 | 98.60 | SANGAT BAIK | 94 |
| | | | | | | | | | |
| | <p><u>Indikator :</u> Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3 ; WDP = 2; Disclaimer = 1)</p> <p><u>Formula Perhitungan :</u> N = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD</p> | Nilai | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | SANGAT BAIK | 3 |
| | | | | | | | | | |
| | <p><u>Indikator :</u> Ratio kemandirian keuangan daerah</p> <p><u>Formula Perhitungan :</u> N = realisasi PAD / realisasi pendapatan x 100 %</p> | Persen | 46.68 | 39.13 | 33,29 | 39.03 | 117.54 | SANGAT BAIK | 33,67 |

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah

Kinerja sasaran meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah diukur dengan indikator Nilai RB perangkat daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan |
|----|--|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah | Nilai RB perangkat daerah | Nilai (N) = Nilai RB perangkat daerah |

Kinerja sasaran meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai (N) = Nilai RB perangkat daerah. Tahun 2023, capaian indikator sasaran sebesar 30 sampai dengan Desember 2023 tidak dapat terealisasi dikarenakan untuk indikator nilai RB perangkat daerah tidak dilakukan lagi penilaian ditingkat SKPD untuk seluruh entitas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan kesepakatan untuk capaiannya dianggap 100 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%. capaian kinerja sasaran ini adalah 33.10 % atau sebesar 132.40 % dari target 25.

Capaian sasaran ini dibandingkan dengan target akhir rencana strategis tahun 2026 sebesar 45, maka capaiannya tidak dapat direalisasikan dikarenakan indikator nilai RB perangkat daerah tidak dilakukan lagi penilaian ditingkat SKPD untuk seluruh entitas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran perangkat daerah.

3.1.2.. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan indikator persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.2. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan |
|----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan | Persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD | $N = (\% \text{ kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan} + \% \text{ pengalokasian belanja dalam APBD})$ |

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai (N) = N = (% kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan + % pengalokasian belanja dalam APBD). Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini sebesar 100 % dari target 100%.

Capaian sasaran ini dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 100%, maka indikator kerjanya tercapai sebesar 100%.

Capaian sasaran indikator kerjanya dibandingkan dengan target akhir renstra Bakuda TA 2026 sebesar 100 %, maka capaiannya tercapai sebesar 100%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran perangkat daerah.

3.1.3. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan indikator kinerja nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan |
|----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan | Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota APBD | N = Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota |

Kinerja sasaran **meningkatkan** kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai (N) = Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota. Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 2 atau sebesar 100 % dari target 2. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran perangkat daerah.

Capaian indikator kinerja di tahun 2023 sebesar 70,39 % dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 0, maka capaiannya 93,85%

Capaian indikator kinerja di tahun 2023 sebesar 70,39 % dibandingkan dengan target indikator kinerja akhir renstra tahun 2026 sebesar 81 %, maka capaiannya sebesar 86,90%

3.1.4. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan indikator persentase penyerapan APBD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.4. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan |
|----|--|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan | Persentase penyerapan APBD | $N = \text{Serapan (\% belanja operasional + \% belanja modal + \% BTT + belanja transfer)}$ |

Kinerja sasaran meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai (N) = Nilai (N)= Serapan (% belanja operasional + % belanja modal + % BTT + % belanja transfer)

Capaian indikator kinerja ini di tahun 2023 adalah sebesar 91.18 %, maka indikator sasaran kinerja ini tercapai sebesar 98.60 %

Capaian indikator kinerja di tahun 2023 sebesar 91.18 % dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 81,74 % maka capaiannya 111,58%

Capaian indikator kinerja di tahun 2023 sebesar 91.18 % dibandingkan dengan target indikator kinerja akhir renstra tahun 2026 sebesar 94 %, maka capaiannya sebesar 97%.

Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran perangkat daerah.

3.1.5. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan diukur dengan indikator opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 1). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.5. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan |
|----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 1) | N = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 1) |

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan N = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 1).

Capaian indikator kinerja di tahun 2023 sebesar nilai 3 dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 3, maka capaiannya 100 %

Capaian indikator kinerja di tahun 2023 sebesar nilai 3 dibandingkan dengan target indikator kinerja akhir renstra tahun 2026 sebesar nilai 3, maka capaiannya sebesar 100%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran perangkat daerah.

3.1.6. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan diukur dengan indikator ratio kemandirian daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.6. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan |
|----|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan | Ratio kemandirian daerah | Ratio = (realisasi PAD/realisasi pendapatan) x 100 % |

Kinerja sasaran meningkatkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan ratio = (realisasi pendapatan daerah /target pendapatan daerah) x 100 % .

Capaian kinerja sasaran ini di tahun 2023 adalah 39.13 % atau sebesar 117.54 % dari target 33.29%.

Capaian kinerja sasaran ini di tahun 2023 sebesar 39.13 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2022 sebesar sebesar 60.35% maka terjadi penurunan sebesar - 35,16%. Penurunan ini dikarenakan untuk indikator kinerja ratio kemandirian keuangan daerah, formulasi perhitungan untuk tahun 2022 menggunakan perbandingan antara realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi pendapatan dana transfer sedangkan di tahun 2023 menggunakan perbandingan antara realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi pendapatan.

Capaian kinerja sasaran ini di tahun 2023 sebesar 39.13 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran akhir tahun renstra sebesar 33.67 %, maka capaiannya sebesar 116.22 %. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran perangkat daerah.

Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2022/baseline | 2023 | | | Target Akhir Renstra(2026) | Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%) |
|----|--|-------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nilai RB perangkat daerah | 33.10 | 30 | - | - | 45 | - |
| 2 | Persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Nilai rata - rata IPKD kabupaten/kota | 0 | 75 | 70.39 | 93.85 | 81 | 86.90 |
| 4 | Persentase penyerapan APBD | | 92.50 | 91.18 | 98.60 | 94 | 97 |
| 5 | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3 , WDP = 2 , Disclaimer = 1) | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 |
| 6 | Ratio kemandirian daerah | 60.35 | 33.29 | 39.13 | 117.54 | 33.67 | 116.22 |

Analisis ketercapaian sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 100 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (~~terlampau/belum melampai~~*).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 100%, terhadap target tahun lalu sebesar 100 terdapat peningkatan/~~penurunan~~ *) sebesar 31.95% (capaian tahun ini dikurang % capaian tahun lalu)
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil ~~tercapai/tidak tercapai~~

Analisis ketercapaian sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 3, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100 % (~~terlampau/belum melampai~~*).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 3, terhadap target tahun lalu sebesar 3 terdapat peningkatan/~~penurunan~~ *) sebesar 100 %(capaian tahun ini dikurang % capaian tahun lalu)
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil ~~tercapai/tidak tercapai~~

Analisis ketercapaian s asaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 39.13, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 117.54 % (~~terlampau/belum melampai~~*).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 60.35, terhadap target tahun lalu sebesar 46.68, maka capaiannya terjadi penurunan sebesar -35.162%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil ~~tercapai/tidak tercapai~~

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

Kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK Kepala Perangkat Daerah):

1. Program pengelolaan keuangan daerah, sasaran kinerja program terlaksananya penyusunan dan penetapan APBD perubahan sesuai

dengan peraturan perundang – undangan, mempunyai indikator kinerja persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD. Formula perhitungan indikator ini adalah $N = \text{nilai rata – rata bobot unsur} \times \text{konstanta}$ dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(100/100) \times 100\% = 100\%$ dari target 100 atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Penyusunan APBD dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga penetapan APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan,;
- b. Penyusunan LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disampaikan tepat waktu, sehingga dapat diaudit oleh BPK sesuai jadwal yang ditentukan;
- c. Pembinaan pengelolaan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik sehingga seluruh kabupaten/kota mendapatkan predikat WTP atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Evaluasi terhadap perubahan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, sehingga ada beberapa program dan kegiatan pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 tidak maksimal pelaksanaannya.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melaksanakan peningkatan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga capaian target program dan Kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
2. Program pengelolaan barang milik daerah dengan dengan sasaran kinerja program terlaksananya peningkatan pengelolaan barang milik daerah mempunyai indikator kinerja nilai kepatuhan penyampaian laporan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan formula perhitungan indikator ini adalah $N = \text{nilai kepatuhan penyampaian laporan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan}$ (patuh = 2, tidak patuh = 1) dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah 2 dari target 2 atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Sumber daya penatausahaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat kompetensinya sehingga penatausahaan barang milik daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan;
- b. Penyusunan Laporan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat dilaksanakan pemenuhan syarat administratif terhadap proses tersebut.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi kepada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penatausahaan barang milik daerah,
 - b. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan / audit BPK RI terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan dengan berkoordinasi dan berkonsolidasi pada semua perangkat daerah.
3. Program pengelolaan pendapatan daerah dengan dengan sasaran kinerja program terlaksananya peningkatan pendapatan daerah mempunyai indikator kinerja persentase peningkatan pertumbuhan PAD dengan formula perhitungan indikator ini adalah $N = ((\text{Realisasi PAD th } N - \text{Realisasi PAD th } N(-1)) / \text{Realisasi PAD th } N(-1)) \times 100\%$ dengan Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $((1.090.477.839.965,10 - 994.667.675.440,14) / 994.667.675.440,14) \times 100\% = -8,79\%$ dari target 8,5 %.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Penetapan target retribusi daerah tidak sesuai dengan kondisi potensi yang ada, sehingga pencapaian target tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Kurangnya dukungan anggaran terhadap program dan kegiatan teknis pada masing-masing OPD yang mengelola retribusi daerah dalam rangka pencapaian target retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah
- c. Menurunnya harga beberapa komoditas utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penetapan target pendapatan asli daerah (PAD) disesuaikan dengan potensi yang ada;
- b. Mengalokasikan dana pengelolaan retribusi pada organisasi perangkat daerah teknis agar dapat melaksanakan pengelolaan retribusi daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah
- c.** Diperlukan adanya campur tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, sektor swasta, masyarakat dan semua pihak dalam mengendalikan beberapa harga komoditas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik dan normal.

Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| NO | INDIKATOR DAN FORMULA PERHITUNGAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nilai RB perangkat daerah Formula Perhitungan : Nilai (N) = Nilai RB perangkat daerah $(0/30) \times 100\% = 0$ | 30 | - | - |
| 2 | Persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD Formula perhitungan : Nilai (N) = (% kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan + % pengalokasian belanja dalam APBD) $(100/100) \times 100\% = 100\%$ | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Nilai rata – rata IPKD kabupaten / kota Formula perhitungan : Nilai (N) = Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota $(70.39/75) \times 100\% = 93.85\%$ | 75 | 70.39 | 93.85% |
| 4 | Persentase penyerapan APBD Formula perhitungan : Nilai (N) = serapan (% belanja operasional + % belanja modal + % belanja transfer) $(91.18 / 92.50) \times 100\%$ | 92.50 | 91.18 | 98.60% |
| 5 | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3 , WDP = 2 , Disclaimer = 1) Formula perhitungan : Nilai = Nilai opini BPK atas pemeriksaan LKPD $(3 / 3) \times 100\% = 100\%$ | 3 | 3 | 100% |

| | | | | |
|---|--|-------|-------|---------|
| 6 | <p>Ratio kemandirian daerah</p> <p>Formula perhitungan :</p> <p>Ratio = (realisasi PAD / realisasi pendapatan) x 100 %</p> <p>(994.676.675.440,14/ 2.542.110.373.052,14) x 100%</p> | 33.29 | 39.13 | 117.54% |
|---|--|-------|-------|---------|

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

| Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan | Keterangan |
|---|--|
|  | <p>Acara Pembinaan Perencanaan penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi</p> |
|  | <p>penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah</p> |

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN.
- d. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Faktor Penghambat keberhasilan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban selaku objek pendapatan daerah
2. Masih lemahnya Identifikasi, pengkajian dan monitoring terhadap potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah
3. Masih kurangnya kuantitas sumber daya aparatur pada Unit Pelaksana Teknis Badan dan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan
4. Masih terbatasnya penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan
5. Belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah
6. Belum optimalnya penatausahaan, pengamanan dan pengawasan Barang Milik Daerah
7. Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan untuk retribusi daerah dan anggaran sosialisasi dan promosi terbatas, serta system pengawasan retribusi kurang optimal
8. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat
9. Penetapan perubahan anggaran agak terlambat, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

8.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

| No | SASARAN | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | | EFISIENSI |
|----|--|--|---------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | % REALISASI | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % REALISASI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah | Nilai RB perangkat daerah | 30 | 0 | 0 | 91.911.447.193,00 | 88.548.186.044,00 | 96,34 | 3.363.261.149,00 |
| 2 | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan | Persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD | 100 | 100 | 100 | 1.591.707.640,00 | 1.443.890.367,00 | 90,71 | 147.817.273,00 |
| | | Nilai rata – rata IPKD kabupaten / kota | 75 | 70,39 | 93,85 | 1.317.348.000,00 | 1.214.254.756,00 | 92,17 | 103.093.244,00 |
| | | Persentase penyerapan APBD | 92,5 | 91,18 | 98,60 | 673.354.764.266,00 | 588.050.935.615,00 | 87,33 | 85.303.828.651,00 |
| | | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3 , WDP = 2 , Disclaimer = 1) | 3 | 3 | 100 | 1.347.760.968,00 | 1.147.290.636,00 | 85,13 | 200.470.332,00 |
| | | Ratio kemandirian keuangan daerah | 33,29 | 39,13 | 117,54 | 5.471.365.250,00 | 4.915.366.234,00 | 89,84 | 555.999.016,00 |
| | TOTAL BELANJA | | | | | 774.994.393.317,00 | 685.319.923.652,00 | 88,43 | 89.674.469.665,00 |

Sumber: <http://SIPD>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2022, Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2023 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 774.994.393.317,- terealisasi Rp 685.319.923.652,- atau 88,43% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 89.674.469.665, - yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi penyaluran dana bantuan keuangan

Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Membangun Samsat Drive Thru di lokasi kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c. Di tahun 2024, membangun Kantor Samsat Pembantu yang berlokasi di Desa Payung Kabupaten Bangka Selatan

Penghargaan

Sepanjang tahun 2023, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

-
-

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Penetapan perubahan anggaran agak terlambat, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2. Harga komoditas utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat terutama daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala.
3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi dari APBD dan APBD perubahan ;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan PAD dengan Instansi terakait;
3. Menyiapkan anggaran yang cukup dalam mendukung agar tercapainya IKU Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis

**Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026**

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR UTAMA (IKU) | TH. 1 | TH. 2 | TH.3 | TH. 4 |
|----|---|----------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah | Indeks reformasi birokrasi | | | 68,25 | 69,00 | 69,75 | 70,50 |
| 1 | | | Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah | Nilai RB perangkat daerah | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 2 | | | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan | Persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Nilai rata - rata IPKD kabupaten/kota | 75 | 77 | 79 | 81 |
| | | | | Persentase penyerapan APBD | 92,50% | 93,00% | 93,50% | 94% |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|
| | | | | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3 , WDP = 2 , Disclaimer = 1) | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | | Ratio kemandirian daerah | 33,29% | 33,45% | 33,51% | 33,67% |



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HARIS A.R, AP, M.H
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. Ir. RIDWAN DJAMALUDDIN, M.Sc

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



M. HARIS. AR , AP
NIP. 197606201995021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAERAH**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target kinerja | Formula Penghitungan Target |
|----|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah | Nilai RB perangkat daerah | 30 | Nilai (N) = perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BAKUDA oleh Inspektorat |
| 2 | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan | Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD | 100 % | Nilai N = (% kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan + % pengalokasian belanja dalam APBD) |
| | | Nilai rata-rata IPKD kabupaten/kota | 75 | Nilai N = nilai rata-rata IPKD kabupaten/ kota |
| | | Persentase penyerapan APBD | 92.50 % | Nilai N = serapan (% belanja operasional + % belanja modal + % BTT + % belanja transfer) |
| | | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1) | 3 | Nilai N = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD |
| | | Ratio kemandirian keuangan daerah | 33.29 % | Nilai N = realisasi PAD / realisasi pendapatan x 100 % |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAERAH**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target kinerja | Formula Penghitungan Target |
|----|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah | Nilai RB perangkat daerah | 30 | Nilai (N) = perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BAKUDA oleh Inspektorat |
| 2 | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan | Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD | 100 % | Nilai N = (% kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan + % pengalokasian belanja dalam APBD) |
| | | Nilai rata-rata IPKD kabupaten/kota | 75 | Nilai N = nilai rata-rata IPKD kabupaten/ kota |
| | | Persentase penyerapan APBD | 92.50 % | Nilai N = serapan (% belanja operasional + % belanja modal + % BTT + % belanja transfer) |
| | | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1) | 3 | Nilai N = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD |
| | | Ratio kemandirian keuangan daerah | 33.29 % | Nilai N = realisasi PAD / realisasi pendapatan x 100 % |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Anggaran = Rp 571.172.881.866,00

| N O | Indikator Kinerja | Program | Anggaran | Keterangan |
|--------|--|---|---------------------|------------|
| 1 | Nilai RB perangkat daerah | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 85.791.316.438 | APBD |
| 2 | Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD | Program pengelolaan keuangan daerah | 1.345.055.020 | APBD |
| 3 | Nilai rata – rata IPKD kabupaten / kota | Program pengelolaan keuangan daerah | 1.300.907.600 | APBD |
| 4 | Persentase penyerapan APBD | Program pengelolaan keuangan daerah | 310.000.000 | APBD |
| | | Program pengelolaan keuangan daerah | 478.396.504.01 3 | APBD |
| 5 | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1) | Program pengelolaan keuangan daerah | 449.769.155 | APBD |
| | | Program pengelolaan barang milik daerah | 708.240.600 | APBD |
| 6 | Ratio kemandirian keuangan daerah | Program pengelolaan pendapatan daerah | 2.871.089.040 | APBD |

Pangkalpinang, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. Ir. RIDWAN DJAMALUDDIN, M.Sc

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



M. HARIS. AR , AP
NIP. 197606201995021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran

RENCANA AKSI
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

| No | SASARAN RENSTRA | | | | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | |
|----|---|---------------------------|---|---|---|--|---|------------------------------|--------|-------|--------|-------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Meningkatkan tata keola internal perangkat daerah | Nilai RB perangkat daerah | Nilai (N) = perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BAKUDA oleh Inspektorat | TW I = 0 TW II = 0 TW III = 0 TW IV = 30 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Sakip perangkat daerah | N = Nilai Sakip Perangkat Daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 80 |
| | | | | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dok perencanaan dan evaluasi | N = Jumlah dok perencanaan dan evaluasi | Dokumen | 6 | 6 | 7 | 6 |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dok perencanaan PD | N = jumlah dokumen perencanaan PD | Dokumen | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen laporan dan Evaluasi PD | N = Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 3 | 3 | 2 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan keuangan | N = Nilai rata-rata bobot unsur x Konstanta | Nilai | 0 | 0 | 0 | 78 |
| | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | N = Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 275 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD | N = Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | N =Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian | N = Nilai rata-rata bobot unsur x Konstanta | Nilai | 0 | 0 | 0 | 77,5 |
| | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | jumlah laporan monitoring kinerja pegawai | N =Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek | N = Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | N = Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum | N = Nilai rata-rata bobot unsur x Konstanta | Nilai | 0 | 0 | 0 | 77 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---------|----|----|----|---|
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | paket | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | N=Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | paket | 4 | 4 | 2 | 2 |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | N=Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 5 | 4 | 3 | 3 |
| | | | | Fasilitas kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | N=Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | laporan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | N=Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 10 | 20 | 15 | 5 |
| | | | | Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | N=Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | dokumen | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | N=Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | dokumen | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | N = Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Dokumen | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | N = Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | Unit | 28 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | N=Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | N = Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | N=Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | N = Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Unit | 18 | 18 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------|----|----|----|----|
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | N=Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | unit | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | N = Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | unit | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | Pemeliharaan Peralatan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | N = Jumlah mebel yang dipelihara | unit | 0 | 3 | 2 | 0 |
| | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | N=Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 0 | 30 | 30 | 0 |
| | | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | N=Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan | Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan | Nilai N = (% kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan + % pengalokasian | TW I = 0 TW II = 0 TW III = 0 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Nilai ketepatan waktu penetapan APBD dan Perubahan APBD | N = 1 (Tidak tepat waktu); N= 2 (Tepat waktu) | Nilai | 0 | 0 | 0 | 2 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| akuntabel berdasarkan peraturan | pengalokasian belanja dalam APBD | belanja dalam APBD) | TW IV = 100 % | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|------------|----|----|----|----|
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan dalam penyusunan APBD/Perubahan APBD | N = Nilai rata-rata bobot unsur x Konstanta | Persentase | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | N=Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | Dokumen | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | N=Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Dokumen | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | N = Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | N = Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dokumen | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | N = Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | Nilai rata - rata IPKD | Nilai N = Nilai rata - rata IPKD | TW I = 0 TW II = 0 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah kabupaten/Kota | N = Jumlah kabupaten/Kota yang | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 7 | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | kabupaten/kot | kabupaten/kota | TW III = 0 TW IV = 75 | | yang mendapatkan | mendapatkan | | | | | | |
|--|---------------|----------------|--------------------------|---|--|---|------------|---|----|---|------|--|
| | | | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Ketepatan Waktu Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Kab/Kota | Nilai Ketepatan Waktu Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Kab/Kota (Tepat Waktu =2, Tidak Tepat waktu = 1) | Nilai | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil analisa statistik keuangan Pemerintah Daerah | N = Jumlah dokumen hasil analisa statistik keuangan Pemerintah Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| | | | | | Nilai Ketepatan Waktu Evaluasi APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota | Nilai Ketepatan Waktu Evaluasi APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Tepat Waktu =2, Tidak Tepat waktu = 1) | Nilai | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | | | | Persentase kesesuaian Perda APBD kab/kota dan Perkada penjabaran APBD Kabupaten/kota dengan peraturan di atasnya | N = (Jumlah Raperda dan Raperkada yang sesuai dengan peraturan/Jumlah Raperda dan Raperkada) x 100 % | Persentase | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | | | | Laporan Hasil Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pemerintah Kabupaten/Kota | N = Laporan Hasil Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pemerintah Kabupaten/Kota | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | | Jumlah sosialisasi regulasi bidang keuangan Kabupaten/kota | N = Jumlah sosialisasi regulasi bidang keuangan Kabupaten/kota | kali | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | N=Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | Laporan | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| | | | | Pembinaan Implementasi | Jumlah Orang yang | N = Jumlah Orang yang | Orang | 0 | 70 | 0 | 0 | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---------|---|---|---|---|--|
| | | | | Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | N=Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Dokumen | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| | | | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | N=Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Laporan | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| | | | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | N=Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Laporan | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| | | | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang | N = Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban | Laporan | 0 | 0 | 0 | 7 | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---------|---|---|---|---|
| | | | | Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | |
| | | | | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | N = Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | | | | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | N = Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan | N = Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi | Dokumen | 1 | 2 | 2 | 0 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|---|---|---|-------------------|----------|----------|----------|----------------|
| | | | | tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | | | | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi | N=Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi | Dokumen | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| | | | | Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD yang Diasistensi | N = Jumlah BLUD yang Diasistensi | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | Sosialisasi Regulasi Keuangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan | N = Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan | Laporan | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase penyerapan APBD | N = serapan (% Belanja Operasional + % Belanja Modal + % BTT + %Belanja Transfer) | TW I = 0 TW II = 0 TW III = 0 TW IV = 92,5% | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | persentase realisasi penyediaan dana belanja APBD | N = (Realisasi Belanja APBD/Belanja APBD) x 100% | Persentase | 0 | 0 | 0 | 92,50 % |
| | | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah dokumen pengelolaan kas daerah | N = Jumlah dokumen pengelolaan kas daerah | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | Jumlah dokumen telaahan persyaratan pencairan Dana Transfer | N = Jumlah dokumen telaahan persyaratan pencairan Dana Transfer | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | | Persentase kesesuaian | N = (Jumlah Pencairan | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|---|---|---|
| | | | | | waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan | dokumen SP2D yang sesuai peraturan / Jumlah Dokumen SP2D) x 100% | | | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | N = Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | N = Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | N = Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | N = Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | N = Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemotongan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | N = Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|------------|---|---|---|------|
| | | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 1) | Nilai N = opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 1) | TW I = 0 TW II = 3 TW III = 0 TW IV = 0 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, | N = Nilai Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (tepat waktu = 2, tidak tepat waktu = 1) | Nilai | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase kepatuhan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP | N = Nilai rata-rata bobot unsur x Konstanta | Persentase | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | | | | | | Persentase penyelesaian kerugian daerah | N = (Jumlah kerugian negara yang ditindaklanjuti / Jumlah kerugian negara dalam hasil audit BPK) x 100% | Persentase | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | | | | | | persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP | N = Nilai rata-rata bobot unsur x Konstanta | Nilai | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | N = Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | N = Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Laporan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban | N = Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran | Dokumen | 0 | 1 | 2 | 0 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|---|--|--|---|-------------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | | tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Pelaksanaan APBD Provinsi | | | | | | |
| | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | N = Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Dokumen | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional | N = Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional | Dokumen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | | | Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | |
| | | | | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | N = Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase penyerapan APBD | N = serapan (% Belanja Operasional + % Belanja Modal + % BTT + %Belanja Transfer) | TW I = 0 TW II = 0 TW III = 0 TW IV = 92,50 % | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan terhadap penyaluran Dana Transfer dan BTT | N = persentase realisasi | Persentase | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | | | | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | persentase realisasi belanja tidak terduga dan dana transfer ke Kabupaten/Kota | N = (Realisasi BTT dan Dana transfer / belanja BTT dan Dana Transfer) x 100% | Persentase | 0 | 0 | 0 | 82% |
| | | | | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | N = Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | Pengelolaan Dana | Jumlah Laporan Hasil | N=Jumlah Laporan Hasil | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|-------------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | | Darurat dan Mendesak | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | |
| | | | | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | N=Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 1) | Nilai N = opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 1) | TW I = 0 TW II = 0 TW III = 0 TW IV = 3 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Nilai Kepatuhan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan | N = Nilai Kepatuhan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan (Patuh = 2, Tidak patuh = 1) | Nilai | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | persentase perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan BMD yang sesuai dengan peraturan | N = (Jumlah Laporan Perencanaan dan Pemanfaat BMD yang sesuai dengan peraturan / Jumlah Laporan Perencanaan dan Pemanfaat BMD)x 100% | Persentase | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | | | | | | persentase pengamanan dan pemindahtanganan BMD yang sesuai dengan peraturan | N = (Jumlah laporan pengamanan dan pemindahtanganan BMD yang sesuai dengan peraturan / Jumlah laporan pengamanan dan pemindahtanganan BMD) x 100% | Persentase | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | | | | | | persentase laporan BMD yang sesuai dengan peraturan | N = (Jumlah Laporan BMD yang sesuai dengan peraturan/Jumlah Laporan BMD) x 100% | Persentase | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | | | | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | N=Jumlah Standar Harga yang Disusun | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik | N=Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik | Dokumen | 0 | 1 | 0 | 0 | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|---|---|---|---|
| | | | | daerah | Daerah | Daerah | | | | | | |
| | | | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | N=Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | Penilaian barang Milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | N=Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | N=Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | N = Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | Rekonsiliasi dalam Rangka Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | N = Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | N=Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang | N=Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|---|--|--|--|------------|----|----|----|------|
| | | | | | | Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | | | Pertumbuhan PAD | N = (Selisih realisasi PAD tahun N dan N(-1) / Realisasi PAD tahun (N-1)) x 100% | TW I = 0 TW II = 0 TW III = 0 TW IV = 8,5% | Program pengelolaan pendapatan daerah | pertumbuhan PAD | N = (Selisih realisasi PAD tahun N dan N(-1) / Realisasi PAD tahun (N-1)) x 100% | persentase | 0 | 0 | 0 | 8,5% |
| | | | | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | N = Jumlah dokumen kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Dokumen | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | | | | | | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah | N = Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | N=Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | N=Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | N=Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | Dokumen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah | Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan | N = Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Retribusi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan | N = Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | Daerah | dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | |
| | | | | UPTB PANGKAL PINANG | | | | | | | | |
| | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah | N = Nilai rata2 survey kepuasan internal | Nilai | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum | N = Nilai rata-rata bobot unsur x Konstanta | Nilai | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | N=Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | N=Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | Fasilitas kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | N=Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | N=Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | Konsultasi SKPD | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | N = Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | dokumen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | N = Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | Unit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | N=Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | N = Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | unit | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | N=Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara | N = Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara | Unit | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | N = Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | unit | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Pemeliharaan Peralatan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | N = Jumlah mebel yang dipelihara | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | N=Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 13 | 14 | 14 | 14 |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | N=Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB Bakuda Wilayah Kota Pangkalpinang | N = (Selisih realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun N dan N(-1) / Realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun (N-1)) x 100% | Persentase | 1,07 | 1,61 | 1,88 | 0,80 |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru) | N = (Realisasi Denda Pajak Daerah pada UPTB/target Denda Pajak Daerah pada UPTB) x 10% | dokumen | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | N = Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | laporan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | N = Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | laporan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan | Persentase realisasi | N = (Realisasi Pajak Daerah | persentase | 25 | 25 | 25 | 25 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | | Pendapatan Daerah | target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang | pada UPTB/target Pajak Daerah pada UPTB) x 100% | | | | | |
| | | | | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | N = Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | dokumen | 23525 | 23525 | 23525 | 23525 |
| | | | | UPTB BANGKA | | | | | | | |
| | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah | N = Nilai rata2 survey kepuasan internal | Nilai | 0 | 0 | 0 | 81,5 |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum | N = Nilai rata-rata bobot unsur x Konstanta | Nilai | 0 | 0 | 0 | 77 |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | N=Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | N=Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | Fasilitas kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | N=Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan | N=Jumlah Laporan | Laporan | 7 | 8 | 8 | 7 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | |
| | | | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | N = Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | dokumen | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | N = Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | unit | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | N=Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | N = Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | N=Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | N = Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | unit | 15 | 15 | 15 | 15 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | Pemerintahan Daerah | Pemerintah Daerah yang dipelihara | Daerah yang dipelihara | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | N = Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | N = Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | N=Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 13 | 14 | 14 | 14 |
| | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | N=Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD | N = (Selisih realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun N dan N(-1) / Realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun (N-1)) x 100% | Persentase | 1,91 | 2,87 | 3,3495 | 1,44 |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru) | N = (Realisasi Denda Pajak Daerah pada UPTB/target Denda Pajak Daerah pada UPTB) x 10% | dokumen | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, | N = Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan | laporan | 0 | 1 | 0 | 0 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | | Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Wajib Pajak Daerah | | | | | | | |
| | | | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | N = Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | laporan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang | N = (Realisasi Pajak Daerah pada UPTB/target Pajak Daerah pada UPTB) x 100% | Persentase | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | N = Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | dokumen | 23525 | 23525 | 23525 | 23525 | 23525 |
| | | | | | UPTB BELITUNG TIMUR | | | | | | | | |
| | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah | N = Nilai rata2 survey kepuasan internal | Nilai | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan umum | N = Nilai rata-rata bobot unsur x Konstanta | Nilai | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | N=Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | Disediakan | | | | | | | | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | N=Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | N=Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | N=Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| | | | | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | N = Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | dokumen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | N = Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | unit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | N=Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | N = Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana | N=Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | atau Bangunan Lainnya | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | N = Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara | unit | 15 | 16 | 16 | 15 |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | N = Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | N = Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | N=Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 13 | 14 | 14 | 14 |
| | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | N=Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Barat | N = (Selisih realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun N dan N(-1) / Realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun (N-1)) x 100% | Persentase | 2,25 | 3,38 | 3,94 | 1,69 |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB (Data wajib pajak terealisasi, | N = (Realisasi Denda Pajak Daerah pada UPTB/target Denda Pajak Daerah pada UPTB) x 10% | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 1 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | | tertunggak, data baru) | | | | | | |
| | | | | Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | N = Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | N = Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang | N = (Realisasi Pajak Daerah pada UPTB/target Pajak Daerah pada UPTB) x 100% | Persentase | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | N = Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Dokumen | 12668 | 12668 | 12668 | 12667 |
| | | | | UPTB BANGKA TENGAH | | | | | | | |
| | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Internal Perangkat Daerah Pada UPTB Bangka Tengah | N = Nilai Rata2 Survey Kepuasan Internal | Nilai | 0 | 0 | 0 | 79 |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Umum | N = Nilai Rata-Rata Bobot Unsur x Konstanta | Nilai | 0 | 0 | 0 | 77 |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket Peralatan | N = Jumlah Paket Peralatan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | dan Perlengkapan Kantor | dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | |
| | | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | N=Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | N=Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | N=Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | N=Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 7 | 8 | 8 | 7 |
| | | | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | N = Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Dokumen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N = Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | Unit | 8 | 0 | 0 | 0 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Pengadaan Mebel | yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | N=Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | N = Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | N=Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Paket | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | N = Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | Unit | 15 | 16 | 16 | 15 |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | N = Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | N = Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | N=Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 13 | 14 | 14 | 14 |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | N=Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka | N = (Selisih realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun N dan N(-1) / Realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun (N-1)) | Persentase | 1,91 | 2,87 | 3,35 | 1,44 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | Pemerintah Daerah | Pemerintah Daerah yang diadakan | Daerah yang diadakan | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | N=Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | N = Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | N=Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | N = Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | unit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | N = Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | Pemeliharaan Peralatan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | N = Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | N=Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | N=Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN | Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD | N = (Selisih realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun N dan N(-1)) | Persentase | 1,94 | 2,91 | 3,40 | 1,46 | 1,46 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | DAERAH | | / Realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun (N-1)) x 100% | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru) | N = (Realisasi Denda Pajak Daerah pada UPTB/target Denda Pajak Daerah pada UPTB) x 10% | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | N = Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| | | | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | N = Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat | N = (Realisasi Pajak Daerah pada UPTB/target Pajak Daerah pada UPTB) x 10% | Persentase | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | N = Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Dokumen | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | | | | UPTB BANGKA SELATAN | | | | | | | | |
| | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Internal Perangkat Daerah Pada UPTB Bangka Tengah | N = Nilai Rata2 Survey Kepuasan Internal | Nilai | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 79,5 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Umum | N = Nilai Rata-Rata Bobot Unsur x Konstanta | Nilai | 0 | 0 | 0 | 77 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | N=Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | N=Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu | N=Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | N=Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 7 | 8 | 8 | 7 | |
| | | | | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | N = Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Dokumen | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan | N=Jumlah Laporan | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | |
| | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | N = Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | Unit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | N=Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | N = Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | N=Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Paket | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | N = Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | Unit | 15 | 16 | 16 | 15 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | N = Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| | | | | | Pemeliharaan Peralatan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | N = Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | N=Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| | | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung | N=Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Lainnya | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Tengah | N = (Selisih realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun N dan N(-1) / Realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun (N-1)) x 100% | Persentase | 2,25 | 3,38 | 3,94 | 1,69 | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru) | N = (Realisasi Denda Pajak Daerah pada UPTB/target Denda Pajak Daerah pada UPTB) x 10% | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | N = Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | N = Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | N = Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Dokumen Ketetapan | 10422 | 10423 | 10423 | 10423 | |
| | | | | UPTB BELITUNG | | | | | | | | |
| | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai Survey Kepuasan Internal Perangkat Daerah pada UPTB Belitung | N = Nilai Rata2 Survey Kepuasan Internal | Nilai | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,5 |
| | | | | Administrasi Umum | Indeks Kepuasan | N = Nilai rata-rata | Nilai | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | Perangkat Daerah | pelayanan umum | bobot unsur x Konstanta | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | N = Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | N=Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | N=Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | N=Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | N=Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| | | | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | N = Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Dokumen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan | N=Jumlah Laporan | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTB Wilayah Kabupaten Belitung) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | N=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | N = Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | Unit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | N=Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | N = Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | N=Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Paket | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | N = Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Unit | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | N = Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | N = Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan | N=Jumlah Peralatan dan | Unit | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | | dan Mesin Lainnya | dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | N=Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB Bakuda Wilayah Kabupaten Belitung | N = (Selisih Realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun N dan N(-1) / Realisasi Pajak Daerah pada UPTB tahun (N-1)) x 100% | Persentase | 2,25 | 3,38 | 3,94 | 1,69 | | |
| | | | | Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah | Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB Kab Belitung (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru) | N = (Realisasi Denda Pajak Daerah pada UPTB/target Denda Pajak Daerah pada UPTB) x 10% | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | N = Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | N = Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak | N = Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Dokumen Ketetapan | 19200 | 19253 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Daerah | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



M. HARIS. AR., AP
NIP. 197606201995021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HARIS A.R, AP, M.H
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2023

| | |
|--|---|
| <p>PIHAK KEDUA, Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,</p>  <p>Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si</p> | <p>PIHAK PERTAMA, KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p>  <p>M. HARIS A.R, AP., M.H PEMBINA UTAMA MADYA NIP.197606201995021001</p> |
|--|---|

Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAERAH**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target kinerja | Formula Penghitungan Target |
|----|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah | Nilai RB perangkat daerah | 30 | Nilai (N) = perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BAKUDA oleh Inspektorat |
| 2 | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan | Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD | 100 % | Nilai N = (% kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan + % pengalokasian belanja dalam APBD) |
| | | Nilai rata-rata IPKD kabupaten/kota | 75 | Nilai N = nilai rata-rata IPKD kabupaten/ kota |
| | | Persentase penyerapan APBD | 92.50 % | Nilai N = serapan (% belanja operasional + % belanja modal + % BTT + % belanja transfer) |
| | | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1) | 3 | Nilai N = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD |
| | | Ratio kemandirian keuangan daerah | 33.29 % | Nilai N = realisasi PAD / realisasi pendapatan x 100 % |

Anggaran = Rp 774.994.393.317


| NO | Indikator Kinerja | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|--|---|-----------------|------------|
| 1 | Nilai RB perangkat daerah | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 91.911.447.193 | P - APBD |
| 2 | Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD | Program pengelolaan keuangan daerah | 1.591.707.640 | P - APBD |
| 3 | Nilai rata – rata IPKD kabupaten / kota | Program pengelolaan keuangan daerah | 1.317.348.000 | P - APBD |
| 4 | Persentase penyerapan APBD | Program pengelolaan keuangan daerah | 558.050.000 | P - APBD |
| | | Program pengelolaan keuangan daerah | 672.796.714.266 | P - APBD |
| 5 | Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1) | Program pengelolaan keuangan daerah | 581.132.868 | P - APBD |
| | | Program pengelolaan barang milik daerah | 766.628.100 | P - APBD |
| 6 | Ratio kemandirian keuangan daerah | Program pengelolaan pendapatan daerah | 5.471.365.250 | P - APBD |

Pangkalpinang, November 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


DR. SAFRIZAL ZA, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


M. HARIS A.R., AP, M.H
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.197606201995021001